

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua unsur yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kebudayaan tidak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat, dan eksistensi masyarakat itu dimungkinkan oleh adanya kebudayaan. Kebudayaan tidak dihasilkan oleh masyarakat yang kacau balau dalam anomali dan anakronisme; oleh sebab itu, diperlukan struktur sosial yang di dalamnya terdapat stratifikasi sosial dan kekerabatan. Kebudayaan dan masyarakat tidak dapat terpisahkan, keduanya berhubungan timbal balik serta saling mendukung.

Dewasa ini, kebudayaan yang merupakan peninggalan-peninggalan Sejarah sudah semakin tergusur. Hampir semua masyarakat dalam seluruh lapisan semakin lupa akan keberadaan budaya daerah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang dianggap lebih modern dibandingkan dengan budaya lokal. Peninggalan-peninggalan Sejarah yang ada di setiap daerah diharapkan mampu menjaga budaya bangsa kita.

Upaya pelestarian terhadap warisan budaya Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial, yaitu dengan dibentuknya komite khusus pada tahun 1822. Komite khusus tersebut adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertujuan mengeksplorasi sumber daya budaya Indonesia untuk meningkatkan citra Belanda di luar negeri¹.

¹ Antariksa, *Pelsetarian Bangunan Kuno sebagai Aset Sejarah Budaya Bangsa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sejarah dan Pelestarian Arsitektur pada Fakultas

Peran pemerintah dalam upaya pelestarian budaya menjadi semakin kuat dengan ditetapkannya *Monumenten Ordonnantie, Staatblad 238/1931* (MO 1931). Secara tegas gedung-gedung yang termasuk cagar budaya tidak boleh dibongkar atau diubah bentuknya, baik berupa *'living monument'* (keraton, rumah adat dan bangunan bersejarah) maupun *'dead monument'* (candi-candi). Sebagai pengganti MO 1931, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya².

Uraian tersebut di atas diperkuat oleh Tanudirjo dalam makalahnya tentang "Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang". Menurut Tanudirjo, peran Negara menjadi semakin kuat dengan ditetapkannya MO No. 19 tahun 1931 *Staatblad 238* yang diperbaiki (Tahun 1934). Ketentuan yang termuat dalam MO tersebut menyiratkan begitu besar penguasaan Negara terhadap warisan budaya. Namun, pada dasarnya MO 1931 merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin akses mereka terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia. Dengan dibentuknya komite MO 1931, para peneliti dan peminat benda cagar budaya yang umumnya diminati oleh orang Eropa dapat lebih leluasa melakukan eksplorasi sumber daya budaya Negara Indonesia³.

Jika ditelaah lebih jauh, upaya pelestarian warisan budaya Indonesia pada umumnya hanya diminati oleh para peneliti asing. Kesadaran akan pentingnya

Teknik Universitas Brawijaya, Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya, Malang 3 Desember 2007, h. 5.

² *Ibid*, h. 5-6.

³ Daud A. Tanudirdjo, *Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*, Makalah Disampaikan pada Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi 2003.

eksistensi peninggalan sejarah sebagai warisan budaya bangsa masih terlihat kurang di kalangan masyarakat lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa, keberadaan kerajaan, keraton, museum-museum, dan peninggalan Sejarah adalah penting bagi bangsa kita. Karena pada umumnya, kerajaan menjadi pusat kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan sebuah wilayah merupakan kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang, sehingga membentuk peradaban di wilayah tersebut.

Keberadaan kerajaan di suatu daerah menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah mengenal sistem pemerintahan dan aturan-aturan sosial. Salah satu warisan budaya yang penting untuk dikaji, yaitu peninggalan bangunan tempat tinggal raja yang dikenal dengan sebutan keraton. Keraton merupakan sebuah struktur sosial yang terdiri atas aturan-aturan masyarakat yang kompleks sehingga mampu menghasilkan kebudayaan yang memiliki kekhasan tersendiri. Bangunan keraton banyak dijumpai di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya bangunan Keraton Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut.

Banggai Laut adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Laut adalah hasil dari salah satu pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan. Keberadaan pemerintahan Kabupaten Banggai Laut saat ini, tidak terlepas dari keberadaan pemerintahan pada masa lampau, yaitu adanya sistem pemerintahan yang berbentuk Keraton. Kerajaan Banggai diperkirakan berdiri pada abad ke 13, tahun 1365 Masehi⁴.

⁴ *Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Angka 2014*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan, 2014), h. xxxvii.

Sejarah berdirinya kerajaan ini secara artifaktual meninggalkan bukti keterkaitannya dengan kerajaan lain seperti Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Bukti ketekaitan yang dimaksud tampak pada konstruksi bangunan Keraton Raja Banggai yang memiliki kemiripan dengan bentuk bangunan Keraton Raja Tidore dan Keraton Raja Ternate sebagai wujud hubungan historis ketiga kerajaan tersebut.

Sejak dahulu kala, Kerajaan Banggai dikenal luas sebagai salah satu kerajaan yang sudah mengenal prinsip demokrasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kerajaan. Posisi jabatan sebagai raja ternyata tidak ditransmisikan atau diwariskan secara turun temurun. Sehingga pada prakteknya tidak dikenal istilah pangeran atau putra mahkota yang secara genealogis memiliki hak otoritas mewarisi tahta kerajaan. Oleh sebab itu, siapa pun memiliki peluang yang sama untuk menjadi raja atas keputusan *Basalo Sangkap* (empat pembesar) yang berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau wakil rakyat. Hal ini merupakan keunikan tersendiri pada model kepemimpinan politik dan kultural pada sistem pemerintahan kerajaan Banggai. Bagi pengunjung yang memiliki pemahaman dan berminat untuk mendalami aspek Historis, akan memperoleh wawasan dan informasi baru pada saat mengunjungi situs bersejarah yang ada di Banggai Laut.

Secara simbolik-politik Banggai Laut juga memiliki bendera berwarna merah-putih bersusun 13 yang merupakan warisan rumpun keramat Paisutobui. Sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa Banggai Laut merupakan kerajaan dengan sistem pemerintahan yang otonom. Daerah ini merupakan tempat wisata

yang indah di mana lokasi Keraton Banggai berada di dataran ketinggian dan kaya akan nilai budaya. Dengan nilai-nilai budaya tersebut, maka sangat baik untuk dikembangkan menjadi tempat wisata yang tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat wisata di daerah lain. Keunikan yang dimiliki tempat ini menarik perhatian masyarakat suku Banggai untuk tetap memelihara dan melestarikan situs bersejarah ini, karena keberadaannya merupakan bukti dari perjuangan masyarakat adat Banggai pada masa lampau. Situs bersejarah ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Banggai sendiri, tetapi juga bagi wisatawan asing yang ingin menggali atau melakukan penelitian di tempat ini, khususnya yang ingin mengetahui benda-benda peninggalan Kerajaan Banggai pada masa lampau.

Letak Situs Bangunan bekas Keraton Banggai terletak di desa Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulawesi Tengah. Pulau Banggai terletak di sebelah Tenggara dari Kota Luwuk. Dari kota Luwuk dapat ditempuh dengan menggunakan kapal motor dengan waktu tempuh adalah antara 8-12 jam. Latar Belakang Sejarah Daerah Banggai sudah dikenal sejak adanya Kerajaan Singasari di Jawa, yaitu pada tahun 1222-1293⁵. Kemudian pada masa Kerajaan Majapahit, Banggai dikenal dengan sebutan Benggawi. Hal tersebut tercantum dalam kitab “Negerakertagama” yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di dalam pupuh 14 ayat 5 disebutkan bahwa kerajaan Benggawi termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit⁶. Kerajaan

⁵ *Bekas Istana Raja Banggai*, <http://databudaya.net/index.php/databudaya/databudayaatribut/cabud/id/1876>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015.

⁶ Iswara N. Raditya, *Sejarah Melayu*, <http://melayuonline.com/Ind/history/dig/505/kerajaan-banggai>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015. Lihat pula, Sofyan Madina, dkk, *Sejarah Kesultanan Banggai*,

Banggai yang dimaksud pada saat itu adalah wilayahnya hanya berada di daerah Banggai, Kabupaten Banggai Laut sekarang (semula Banggai Kepulauan) dengan Ibu kota kerajaan adalah Banggai.

Menurut informasi dari para tokoh adat Banggai, Raja Banggai pertama adalah seorang keturunan Jawa yang bernama Adi Cokro atau lebih dikenal dengan gelar *Mumbu doi Jawa*, yang artinya wafat di Jawa. Istilah *Mumbu* berarti wafat atau mangkat yang dikhususkan untuk raja-raja Banggai atau bagi yang tertinggi derajatnya. Berdasarkan silsilah raja-raja Banggai, *Mumbu doi Jawa* tercatat sebagai pemimpin ke-6 Banggai setelah Adi Lambal Polambal pemimpin ke-5. Pemimpin Banggai silih berganti, yang kemudian Banggai dipimpin oleh putra Adi Cokro yang bernama Mandapar pemimpin ke-18 yang dilantik pada tahun 1600 oleh Sultan Ternate Said Uddin Barkat Syah (masa pemerintahan dari tahun 1583-1606)⁷.

Pada masa sebelum Kerajaan Banggai dikuasai Ternate, yaitu tahun 1580-1624, Gowa sejak tahun 1624-1667 dan kembali lagi dikuasai Ternate tahun 1667-1907, di daerah ini terdapat beberapa kerajaan⁸. Kerajaan Banggai mulai meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke Tanjung Api Sungai Bongka, dan pulau Togong Segu perluasan wilayah ini terjadi pada masa pemerintahan raja

(Kementrian Agama RI: Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2012), h. 79-80.

⁷ Achmad Abuhadjim, Hamsun Bekuat di Desa Lompio, *Menceritakan tentang Raja Banggai Adi Cokro dan Mandapar*, Wawancara Dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2015. Lihat pula, *Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Angka 2014*, *op. cit.* h. xxxvii. Sofyan Medina, dkk, *loc. cit.* h. 150-80. Haryanto Djalumang, *Sejarah Kabupaten Banggai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 26. H.S. Padeatu, *Sepintas Kilas Sejarah Banggai serta Perlawanan terhadap Penjajahan Belanda dan Jepang di Daerah Luwuk Banggai*, (Rajagrafindo Persada, 2005), h. 31-36. Machmud HK., *Babad Banggai Sepintas Kilas*, (Jakarta: Grafindo Persada), h. 4 dan 30-31.

⁸H.S. Padeatu, *op. cit.* h. 17.

Mumbu Doi Jawa. Kerajaan Banggai memiliki hubungan kekuasaan dengan Kerajaan Majapahit. Selain itu, Kerajaan Banggai juga memiliki hubungan kekuasaan dengan Kerajaan Ternate. Karena ke dua kerajaan tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan, yang kemudian Ternate menguasai sepenuhnya Kerajaan Banggai sebagai Kerajaan Otonom di bawah Kesultanan Ternate. Banggai juga mendapat pengaruh dari Portugis pada sekitar sebelum abad IX. Pengaruh Belanda masuk Banggai terjadi pada tahun 1900-an. Dengan kedatangan Belanda maka Kerajaan Banggai lepas dari kekuasaan Kerajaan Ternate selanjutnya Kerajaan Banggai diberi status *Zelfbestuurende Landschappen*.

Pada tahun 1942 balatentara Jepang masuk ke Banggai, sehingga struktur pemerintahan kerajaan tunduk pada kekuasaan Jepang⁹. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Syukuran Amir, pusat pemerintahan yang semula berada di Ibukota Kerajaan Banggai, dipindahkan ke kota Luwuk. Bangunan bekas Keraton Kerajaan Banggai dibangun di atas sebuah bukit dengan ketinggian 11,57 meter di atas permukaan laut. Orientasi bangunan menghadap ke arah barat laut luas keseluruhan bangunan adalah 221 m², dengan luas lahan 3218.00 m²¹⁰.

Menurut keterangan yang diperoleh dari para tokoh adat Banggai, Keraton Kerajaan Banggai dibangun pada tahun 1927¹¹. Konstruksi Bangunan Keraton Kerajaan Banggai terbuat dari bahan kayu dengan lantai semen dan atap memakai

⁹ H.S. Padeatu, *op. cit.* h. 125-139.

¹⁰ *Bekas Istana Raja Banggai*, <http://databudaya.net/index.php/databudaya/databudayaatribut/cabud/id/1876>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015.

¹¹ Achmad Abuhadjim, Hamsun Bekuat di Desa Lompio, dan Halim Sulumin di Desa Mominit, *Menceritakan tentang Tahun Berdirinya Bangunan Keraton Kerajaan Banggai*, Wawancara Dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2015.

seng. Sebelum memasuki serambi depan, terdapat sebuah tangga masuk. Di sebelah kanan dan kiri tangga, terdapat dua buah meriam dibuahkan dudukannya. Dalam bangunan induk terdapat bagian-bagian seperti serambi depan, kamar tidur, dan sebuah ruang tengah. Di belakang bangunan induk terdapat sebuah lorong yang menghubungkan bangunan induk dengan bagian belakang. Bagian belakang terdiri dari sebuah serambi, 3 buah kamar, sebuah dapur dan 2 buah kamar mandi.

Hal yang menarik dari Keraton Banggai yaitu pada sistem pengangkatan Raja tidak selalu berdasarkan adanya garis keturunan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa penulis mengangkat kajian ini. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat, diikuti dengan perkembangan budaya yang tanpa batas, sehingga keberadaan Keraton Banggai sebagai aset pemerintah dan situs sejarah juga sudah jarang tersentuh, bahkan sudah semakin tergusur. Oleh sebab itu, penulis ingin menelaah lebih mendalam tentang eksistensi Keraton Banggai untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang situs sejarah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan merujuk pada fokus penelitian yaitu, Keraton Banggai Periode 1927-2000, maka permasalahan yang dikaji pada penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Asal-usul dan Latar Belakang Terbentuknya Keraton Banggai?
2. Bagaimana Perkembangan Keraton Banggai Dari Tahun 1927-2000?
3. Bagaimana Falsafah Kerajaan Banggai dan Makna Filosofis Keraton Kerajaan Banggai.?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat permasalahan penelitian relatif luas, serta adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peneliti, maka diperlukan pembatasan masalah yang mencakup:

1. Skope Kajian

Skope kajian di sini menunjuk pada bidang atau yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah Keraton Banggai Periode 1927-2000.

2. Skope Spasial

Skope spasial menunjuk pada tempat yang menjadi objek penelitian dan fokus kajian yaitu, di daerah Kabupaten Banggai Laut sebagai tempat terjadinya peristiwa. Dengan adanya batasan tempat ini maka akan lebih mudah mempelajari serta fokus kajian penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian yang sesuai, akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

3. Skope Temporal

Skope temporal dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi babakan waktu sejarah Keraton Banggai dari tahun 1927-2000.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terbentuknya Keraton Banggai.
2. Untuk Mengetahui Perkembangan Pemerintahan Keraton Banggai dari Tahun 1927-2000.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Falsafah Kerajaan Banggai dan Makna Filosofis yang terkandung di Keraton Kerajaan Banggai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat positif terhadap pengembangan wawasan dan dapat memberikan sumbangan teori dalam bidang Ilmu Sejarah, untuk mengembangkan konsep dalam kajian ilmu Sejarah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lain untuk dimanfaatkan sebagai bahan acuan ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih lengkap.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang bagaimana menjaga kelestarian Keraton Banggai agar tetap terjaga sampai pada generasi selanjutnya.
- b. Bagi golongan bangsawan pada khususnya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan dalam kiprahnya selaku anggota masyarakat.
- c. Bagi institusi dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sekaligus referensi untuk mencermati beberapa pola stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sejarah.

Metode penelitian sejarah bertujuan untuk menggambarkan peristiwa sejarah secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data sejarah. Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur mengatakan bahwa metode sejarah mencakup empat langkah yaitu:

1. Tahap Heuristik

Heuristik yaitu, berasal dari kata Yunani *Heuriskein*, artinya memperoleh. Heuristik seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, mengenali dan memperinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan. Selanjutnya, Cerrad dalam Sjamsuddin mengemukakan bahwa, Heuristik merupakan langkah awal sebagai sebuah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah¹².

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Heuristik merupakan langkah pertama dalam penulisan sejarah yaitu dengan pengumpulan data sebanyak mungkin untuk dijadikan sumber penelitian sejarah. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian sejarah, yaitu sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi. Sebaliknya, sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Oleh sebab itu, peneliti harus mampu mengetahui secara benar tentang sumber primer dan sumber sekunder dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, sumber penelitian “Keraton Banggai Periode 1927-2000” terdiri atas:

¹² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 86.

- 1) Sumber primer yaitu, sumber yang berasal dari fakta sejarah kerajaan Banggai dan fakta eksistensi Keraton Banggai.
- 2) Sumber sekunder terdiri atas:
 - a) Peninggalan benda-benda sejarah yang terkait dengan Keraton Kerajaan Banggai.
 - b) Peninggalan tertulis berupa naskah dokumen sejarah Kerajaan Banggai.
 - c) Peninggalan non tertulis berupa cerita masyarakat tentang Kerajaan Banggai.
 - d) Sumber yang berasal dari pewaris Kerajaan Banggai.
 - e) Informasi yang berasal dari sesepuh Kerajaan Banggai.
 - f) Buku, artikel, jurnal ilmiah, naskah cerita rakyat, dan sumber internet yang terkait dengan Kerajaan Banggai.

Selanjutnya, dalam pengumpulan data ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Langkah pertama pada penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan¹³.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 145.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk menemukan pelbagai bentuk permasalahan yang akan diteliti dan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dari informan.

Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁴.

Moleong mengemukakan bahwa, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan¹⁵.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian ilmu sosial. Pada intinya, metode dokumenter merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, data-data dokumenter memiliki peran yang sangat penting¹⁶.

¹⁴ *Ibid*, h. 231

¹⁵ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 121.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan haria, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain¹⁷.

2. Tahap Kritik (verifikasi)

Setelah sumber data terkumpul, Jacques Barzum dan Henry F. Graff mengemukakan bahwa, tahap yang berikutnya adalah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Pada tahap ini, penulis melakukan langkah-langkah di antaranya yaitu, mengoreksi sumber data yang telah diperoleh, memilih data-data yang merefrentasikan dari semua sumber data yang telah diperoleh¹⁸. Selanjutnya, penulis melakukan pengecekan data ke berbagai pihak, seperti pada instansi yang terkait dengan pemeliharaan situs sejarah Keraton Banggai yang berada di Kabupaten Banggai Laut.

Hal tersebut dilakukauna guna menguji keabsahan tentang keaslian sumber (*otensitas*) yang dilakukan melalui kritik eksternal, dan keabsahan tentang keaslian sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik internal. Kritik internal yaitu, menelaah tentang kebenaran isi atau fakta dari sumber, baik sumber tersebut dari buku, artikel, maupun arsip serta wawancara lisan dengan narasumber. Kritik eksternal dilakukan dengan cara pengujian untuk menentukan

¹⁷ Sugiyono, *loc. cit.* h. 240.

¹⁸ Sjamsuddin, *loc. cit.* h. 103

keaslian sumber baik dari buku maupun wawancara. Adalah sangat penting untuk melakukan kritik eksternal demi menjaga objektivitas suatu data.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran data sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Kata analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya seperti yang dikatakan Kuntowijoyo bahwa analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi¹⁹.

Pada tahap interpretasi ini, data yang diperoleh akan dianalisis atau diinterpretasikan untuk mencari runtutan peristiwa secara sistematis, dengan menggunakan berbagai teori yang telah dipaparkan sebelumnya, serta tetap memusatkan perhatian pada permasalahan yang akan dikaji, sehingga diperoleh hasil sesuai yang diharapkan.

4. Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam penulisan sejarah, historiografi ini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penulis berusaha mengorganisasikan data yang telah dikritik untuk disajikan ke dalam bentuk tulisan.

Historiografi merupakan rekonstruksi imajinatif dari peristiwa masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis semua rekaman dan peninggalan masa lampau. Secara

¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 103.

harfiah, historiografi adalah pelukisan sejarah atau gambaran peristiwa yang terjadi pada masa lampau²⁰.

Selanjutnya, menurut Dudung penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak awal (fase perencanaan) sampai dengan tahap terakhir²¹. Jadi dengan penulisan sejarah itu akan ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri.

²⁰ *Ibid*, h. 43-44.

²¹ *Ibid*, h. 67.